**PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT**

**Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility**

Oleh : *Sidik R. Usop*

**Pendahuluan**

Pembangunan berbasis masyarakat merupakan perdebatan antara pemikiran strukturalis dengan poststrukturalis berkenaan dengan penggunaan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada pemikiran strukturalis, negara sebagai pemegang kekuasaan lebih mengutamakan pembangunan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis menimbulkan efek ganda (*multiplier effects*) terhadap kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat.

Pada masyarakat industri, peluang usaha yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif sehingga berdampak bagi penigkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya pada masyarakat yang masih tergantung pada sektor pertanian, pengembangan ekonomi kreatif perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka memiliki kemampuan yang secara bertahap berkembang menjadi masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, pemikiran strukturalis cenderung menciptakan ketidak adilan dan kesenjangan sosial.

Pendekatan poststruktukturalis beranggapan bahwa pemegang kekuasaan melakukan dominasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dalam konteks ini harus ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan mengembangkan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008) menyebutkan bahwa poststrukturalis telah memunculkan wacana alternatif sebagai bagian dari proses perkembangan, walaupun tidak menyediakan resep seperti pada pendekatan strukturalis, namun ia memberikan suatu perspektif pada kerja yang sangat kuat dan dapat memperkuat proses pemberdayaan.

Jalan tengah yang dapat menyembatani kedua pendekatan di atas adalah pendekatan konstruksi social dari Berger dan Luckmannn (!980) yang mengintegrasikan secara dinamik peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan dari masyarakat yang seharusnya mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan transformasi dengan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Merujuk pada pemikiran di atas, maka partisipasi aktif masyarakat merupakan bagian terpenting untuk menciptakan model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, salahsatunya adalah melalui Tanggung Jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)

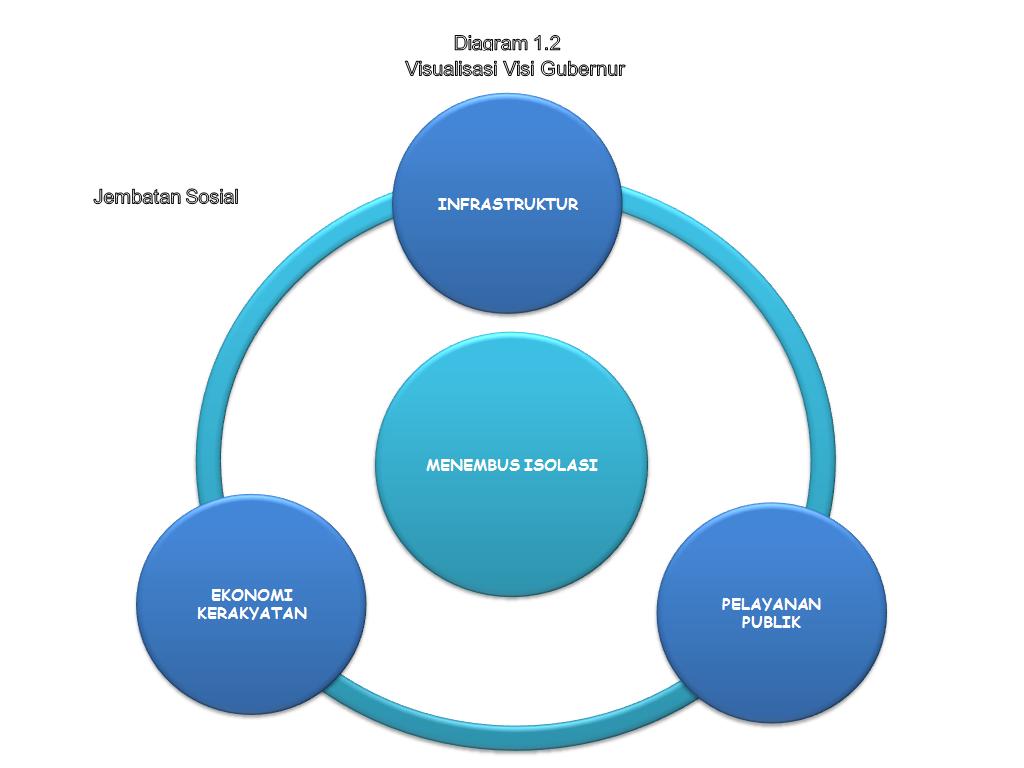
**Membuka Isolasi dan membangun Masyarakat yang Bermartabat**

“Purwo Santoso dan Cornelis Ley (2009) dalam bukunya yang berjudul *Kalimantan Tengah membangun dari Pedalaman dan membangun dengan Komitment* telah mengutip pidato Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah A.Teras Narang yang mengatakan sebagai berikut :

“Kita, masyarakat Kalteng,sudah terlalu lama hidup dalam kondisi minimnya keseriusan pemerintahnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat esensial bagi masyarakat, mulai dari penyediaan infra struktur fisik seperti jalan raya, jembatan, dan infra struktur yang terkait dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti air minum. Kita masyarakat kalteng, juga telah lama hidup dalam situasi ketidakseriusan pemerintahnya dalam menyediakan pelayanan dasar seperti jaminan akan pelayanan kesehatan yang merata, murah dan jaminan akan pendiudidkan dasar yang merata dan murah. Lebih luas lagi, kita masyatkat kalteng, telah terlampau lama hidup dalam situasi dimana peran pemerintah sangat minim dalam menjain berkerjanya perekonomian rakyat yang dapat dilakukan melalui penjamin pengaturan dalam proses produksi dan distribusi hasil perekonomian rakyat”

Pada bagian lain, Cornlis Ley (2007) dalam bukunya yang berjudul “Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah” memberikan gambaran mengenai peran swasta dalam menembus isolasi di Kalimantan Tengah dengan topik yang berjudul “Kalangan Bisnis : Pra Syarat Eksploitasi” menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam konteks Kalimantan Tengah pasca berakhirnya era kayu, kegiatan investasi ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya perkebunan dan sektor pertambangan……….. Pertimbangan bagi fasilitasi investasi sangat kuat terlihat misalnya dari rencana pembukaan jalur kereta api yang menembus wilayah pedalaman Kalimantan. Pada tahap awal, jalur kereta api tersebut akan menjadi sarana utama yang menghubungkan antar daerah-daerah pertambangan batubara dengan pelabuhan-pelabuhan tempat pengangkutan batubara keluar daerah. Bahkan jika dicermati secara detil, rencana jalur kereta api yang akan dibangun menghubungkan daerah-daerah yang di masa datang akan dikembangkan sebagai sentra industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Membuka infra struktur bagi kepentingan investasi dan pengembangan ekonomi yang lebih luas tentu saja masuk akal, namun sedari awal harus digarisbawahi secara tegas bahwa infra struktur juga harus member dampak langsung bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Artinya, jangan sampai terbukanya daerah dari isolasi justru berujung akhir pada kebocoran-kebocoran ekonomi lokal, yang justru semakin menterkebelakang-kan Kalimantan Tengah”



**Dinamika Pembangunan di Kalimantan Tengah**

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia dan di tengah-tengah Asia – Pasifik dengan luas wilayah 153.564 Km2 yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur. Sejak diberlakukannya UU N0. 22 Tahun 1999 tetang otonomi Daerah, maka berdasarkan UU No.5 Tahun 2002 yang mengatur pemekaran provinsi, Provinsi Kalimatan Tengah menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota; 120 Kecamatan, 67 Kadamangan dan Mantir Adat yang tersebar di setiap desa; 130 Kelurahan dan 1.318 Desa.

Kondisi wilayah Kalimantan Tengah tersebut, memberikan peluang perdagangan internasional dengan alternatif melalui laut Cina dan ke Eropah melalui laut Jawa. Dengan demikian Kalimantan Tengah seharusnya tidak bertahan dengan industri hulu yang hanya memproduksi bahan mentah, tetapi mengembangkan industri hilir yang mengolah bahan jadi sebagai strategi perekonomian Kalimantan Tengah ke depan. Pada sisi lain lembaga Kadamangan sebagai bagian dari kekhususan lembaga adat yang harus dikembangkan secara dinamik untuk mengembangkan masyarakat adat dan persoalan-persolaan investasi yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat.

Jumlah hutan belantara seluas 126.200 Km2 yaitu sebesar 70% dari 153.564 Km2 luas Kalimantan Tengah merupakan kekayaan alam yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam rangka pengurangan emisi karbon dan pemanasan global, di mana Kalimantan Tengah sangat potensial bagi perdagangan karbon. Demikian juga dengan ketersedian lahan gambat seluas 3.010.640 Ha atau 52,18% dari total lahan gambut di Kalimantan, memberikan perhatian dunia betapa pentingnya Indonesia bagi penyelamatan bumi akibat perubahan iklim. Di dalam kawasan hutan tersebut, terdapat pula hutan *pahewan* dan *sepan* yang merupakan kawasan hutan konservasi yang dilindungi secara adat yang keberadaannya sangat terancam oleh adanya investasi perkebunan, tambang dan HPH.

Dengan jumah penduduk yang masih kecil yaitu 2.057.000 jiwa dengan kepadatan 13 jiwa per Km2 maka mobilitas penduduk pendatang ke Kalimatan Tengah menjadi sangat strategis bagi pembangunan Kalimantan Tengah, namun di sisi lain ketimpangan sosial dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial jika kondisi ini tidak diantisipasi secara dini. Walaupun kondisi ekonomi KalimantanTengah hingga tahun 2008 menunjukan pertumbuhan yang terus meningkat, yaitu : PDRB tahun 2008 sebesar 16,725 Triliun dengan pertumbuhan ekonomi 6,16 %, tingkat pemerataan (gini ratio) 0,230 yang menunjukan ketimpangan yang rendah, tingkat kemiskin tahun 2009 sebesar 165.850 jiwa (7,02%), angka pengangguran 5,00% dan Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 sebesar 73 merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan Provisi lainnya di Kalimantan.

Kawasan Daerah Aliran Sungai merupakan ciri khas Kalimantan Tengah, terdiri atas 11 DAS besar dan sungai-sungai kecil yang mengalir dari arah utara ke selatan dan bermuara ke laut Jawa. Secara faktual keberadaan perusahaan HPH dan Perkebunan Besar berada di bagian hulu DAS, dekat dengan pemukiman masyarakat lokal yang umumnya dalam kehidupan subsisten. Masyarakat di bagian hulu ini adalah masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi dan sering berbenturan dengan pengusaha-pengusaha besar tersebut. Misalnya pelanggaran wilayah kelola sejauh 5 Km dari kiri-kanan pinggir sungai telah menggangu sumber kegiatan ekonomi dan tatanan sosial budaya masyarakat lokal (*eka malan manana*), termasuk juga penggusuran situs-situs budaya yang tersebar di dalam areal perusahaan. Keberadaan sungai dan anak sungai tersebut juga berfungsi terhadap keberlangsungan lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar. Secara umum dapat kita katakan bahwa kerusakan lingkungan di bagian hulu akan menyebabkan banjir di bagian hulu dan hilirnya. Kondisi ini terlihat dari besaran lahan kritis diKalimantan Tengah sebesar 7.000 hektar pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 9.000 hektar. Dasar pemikiran ini, memberi peluang dikembangkannya paradigma pembangun dari hulu (*community base development*) dengan pertimbangan bahwa selama ini, mereka yang terpinggirkan dalam proses pembagunan :” *tempun petak menana sare, tempun uyah batawah belai dan tempun kajang bisa puat*”

Realitas sosial di Kalimantan Tengah, terbentuk dari pengalaman sejarah dan pengalaman masyarakat dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi, sehingga membentuk kesadaran bersama untuk melakukan sebuah tindakan yang mendorong suatu proses transformasi dalam kehidupan masyarakat.

Konsep pembangunan Kalimantan Tengah merupakan rumusan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam memeberikan respon terhadap pengaruh luar yang membelenggu kehidupan mereka, sehingga terjadi interaksi dan integrasi yang memperkuat identitas Dayak dalam menghadapai tantangan pembangunan pada masa kini. Konsep pembangunan yang tertangkap dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dikenal sebagai **Manyalamat Petak Danum** (menyelamat tanah air) yang meliputi :

(1) **pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang arif terhadap lingkungan dan menjamin keangsungan hidup manusia**. Konsep ini telah dicetuskan dalam Musyawarah besar Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah Tahun 2002 yang menghasilkan deklerasi bahwa Kalimantan Tegah sebagai Daerah Ekologi. Konteks pemikiran ini, bersumber dari symbol Batang Garing yang bermakna keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan hubungan sesame manusia. Selain itu, di Kalimantan Tengah, banyak terdapat **Pahewan** yang tersebar di darah-daerah kabupaten sebagai kawasan konservasi yang dikeramatkan dan dilindungi secara adat oleh masyarakat, disamping hak-hak adat seperti **Kaleka dan situs-situs budaya yang terkait dengan ritual kepercayaan kaharingan**. Eksistensi adat merupakan bagian dari identitas etnis yang terus dipertahankan, teramasuk melawan arus globasisasi ekonomi yang akan menyingkirkan mereka dalam kehidupan ekonomi.

Kondisi ini terkait pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan andalan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah , menggantikan sektor perkayuan yang sudah mulai menurun. Lebih khsus lagi kalau kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Pembangunan kelapa sawit sebagai **Pilar ekonomi Nasional** (seminar, Desember 2006 di Bali) dan **minyak sawit akan menggantikan sumber bahan bakar pengganti minyak** (biofuel). Hadirnya kekuatan-kekuatan ekonomi Nsional dan Internasional di Kalimantan Tengah ini dikhawatirkan akan memarginalisasikan orang-orang Dayak dari kegiatan ekonomi dan disisi lain kelangsungan sumberdaya alam akan menggangu kehidupan mereka pada masa yang akan datang seperti pesan leluhur berikut ini *ingat peteh Tatu hiang, Petak danum akan kalunen harian andau.* Konsep ini sesuai dengan konsep lingkungan hidup yang dikenal dengen *sustainable livelihood.*

(2). **Pemanfataan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat**, dalam implimentasi kebijakan yang cenderung menepatkan masyarakat dalam posisi yang lemah, jauh dari akses informasi dan akses terhadap politik sehingga mereka tidak memiliki kemampuan tawar yang berimbang dengan pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Kondisi ini tentu saja harus dicari dan digali cara-cara pengelolaan yang menempat masyarakat sebagai pelaku atau subjek pembangunan, sehingga terjadi kesimbangan yang proporsional dalam pemanfaat sumberdaya alam dan bukan orang dirugikan dalam prosees pembangunan tersebut. (3). **Integrasi sosial yang menempat nilai *budaya belom bahadat* sebagai standar dalam hubungan antar sesame manusia dan hubungan dengan alam.** Kondisi ini terkait dengan *Pali* (pantangan) yang tidak boleh dilanggar menurut adat orang Dayak. Nilai *belom bahadat* yang merupakan identitas masyarakat Dayak ini bersifat cair dan terus menerus dikonstruksikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan makna penting bukan hanya bagi orang Dayak tetapi juga dalam pergaulan yang sifatnya lebih luas. Konteks ini juga akan memberikan pemahaman bahwa, adat dan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah perlu **direvitalisasi** agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat pada masa kini dan menjangkau kehidupan yang akan datang.

4). **Penguatan institusi Kadamangan dan mengoptimalkan peran Damang Kepala Adat dalam membantu menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakkat**. Eksistensi Kadamangan ini ternyata sangat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat mengurangi tumpukan berkas-berkas yang terlambat ditangani oleh kejaksaan. Selain itu, dimungkinkan pula terjdinya integrasi antara hukum adat dengan hukum formal sehingga dapat menjembatani kesenjangan (*gap*) antara hukum adat dan hukum formal.

(5). **Menembus keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian hulu –hulu daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah,** sehingga mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat yang bermukim di perkotaan dan bagian hilir daerah aliran sungai. Kesenjangan akan berdampak terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat, sehingga terjadi proses pembodohan dalam kehidupan masyarakat.



**Pemberdayaan Masyarakat melalui CSR**

Setiap perusaan harus memegang tiga prinsip, yaitu profit, people dan planet, yang selain mengejar keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan, serta pelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melaui CSR adalah sebagai berikut : (1) Pengembangan kapasitas SDM di lingungan internal perusaaan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya (2) Penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan (3) Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosial, jika tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik (4) Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate management*. (5) Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik (sumber daya alam) serta lingkungan social dan budaya, termasuk kearifan lokal.

Pengembangan masyarakat (*community development*) dapat diartikan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan keterampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

1. Kehadiran pihak luar bukan untuk mengambil alaih tanggung jawab upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Karena itu kehadirannya tidak boleh menciptakan situasi ketergantungan, tetapi cepat atau lambat, harus menumbuh kemandirian masyarakat program pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Pengertian mandiri yang dimaksudkan bukan berarti menolak atau tidak lagi memerlukan bantuan/dukungan pihak luar, tetapi memiliki kemampuan untuk menawar setiap bantuan/dukungan yang ditawarkan oleh pihak luar.
3. Program-program pembangunan yang diupayakan secara mandiri oleh masyarakat tersebut tidak bersifat sementara, tetapi harus berkelanjutan untuk waktu yang tidak terbatas.

Mengacu pada pengertian di atas, maka setiap kegiatan pengembangan masyarakat harus dilandasi filosofi kerja sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri
2. Terus menerus berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup dalam arti yang seluas-luasnya (fisik,social,ekonomi, mental/spiritual)
3. Menjaga keserasian dan keseimbangan, baik antara sesama warga masyarakat, antara masyarakat dan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Penciptanya.

Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
2. Membangun daya, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilki dan berupaya untuk mengembangkannya
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimilki oleh masyarakat
4. Penyediaan berbagai masukan (input)
5. Pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunity) yang membuat masyarakat menjadi semakin berdaya
6. Peran orang luar (OL) sebagai fasilitataor bukan pelaku

**Kesimpulan**

1. Investasi di Kalimantan Tengah merupakan bagian penting bagi peningkatan pendapatan daerah, namun belum sepenuhnya terjadi di tingkat masyarakat. Perlu adanya berbagai terobosan pemikiran dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mendorong masyarakat sebagai pemanfaat, bukan hanya sebagai penerima dampak kerusakan lingkungan yang selama ini mereka alami.
2. Meningkatnya mobilitas masyarakat ke Kalimantan Tengah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan barang, jasa dan manusia. Pada sisi laian dapat pula sebagai penciptaan kondisi konflik karena meningkatnya kepentingan yang dimobilisasi oleh pihak ketiga. Kondisi seperti ini harus pula disadari oleh semua pemangku kepentigan sehingga secara bersama-sama berupaya untuk memncegah terjadinya konflik social. Secara umum kita berharap transformasi social yang terjadi di Kalimantan Tengah dapat mendorong percepatan pembangunan yang arif terhadap lingkungan dalam suasana yang tetap mempertahankan integrasi sosial.
3. Pengembangan masyarakat merupakan hak dari masyarakat untuk mendapat perlakuan adil dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Diharapkan dapat dikembangkan kelembagaan di tingkat perusahaan dan di tingkat masyarakat dalam upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat. Selain itu diperlukan pula komitment dari perusahaan untuk melaksanakan program-program kemitraan dengan masyarakat dengan mendayakan model-model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat.
4. Adanya tindaklanjut dari workshop dengan membentuk working Group untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan dan menyusun program-program aksi yang dilakukan secara berkelanjutan
5. Perlu dikembangkan program aksi yang spesifik Kalimantan Tengah dalam rangka mencegah secara dini terjadinya konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

**Referensi**

Ley, Cornelis (editor). 2007. *Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah.* Yogyakarta : JIP UGM

Mardikanto, T. 2010. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Solo : UNS Pres

Santoso, P dan Ley, C.(editor). 2009. *Kalimantan Tengah Membangun dari Pedalaman dan Membangun dengan Komitmen*. Yogyakarta : JIP UGM

Tesoriero, F dan Ife, Jim. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Community Development.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Usop, SR. 2010. Tantangan dan peluang Pembangunan Kalimantan Tengah. *Seminar pembangunan Kawasan Kalimantan Terpadu* di Banjarmasin.